

GUINEA BISSAU MERDEKA

Kirdi DIPOYUDO

Pengantar

Kemerdekaan Guinea Bissau yang diumumkan Presiden De Spinoza di Lisabon pada tanggal 10 September 1974 dalam rangka implementasi persetujuan yang ditandatangani oleh wakil Portugal dan wakil Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Cabo Verde (PAIGC) di Aljazair pada tanggal 26 Agustus 1974, di mana-mana umumnya disambut dengan gembira, khususnya oleh mereka yang ikut memperjuangkan seperti Komite Pembebasan Organisasi Persatuan Afrika, Komisi Dekolonisasi PBB, dan negara-negara anti kolonial, termasuk Indonesia. Tidak hanya karena berarti bahwa suatu negeri jajahan mendapatkan kemerdekaannya, tetapi juga karena hal itu akan mempercepat proses dekolonisasi baik koloni-koloni Portugis lainnya, termasuk Timor Dili, maupun negeri-negeri yang dikuasai minoritas kulit putih seperti Rhodesia dan Afrika Selatan. Dengan demikian kejadian itu mempunyai arti yang cukup penting, khususnya dalam sejarah perjuangan untuk mengakhiri kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Karangan ini bermaksud membahas latar belakang dan konsekuensi-konsekuensi kejadian itu. Secara berturut-turut akan dibicarakan tahap-tahap perjuangan kemerdekaan Guinea Bissau, pengaruhnya atas perkembangan politik negeri-negeri jajahan lainnya, masalah-masalah yang dihadapi negara baru itu dan prospek penyelesaiannya.

I. Gambaran umum

Guinea Bissau, yang sebelum mencapai kemerdekaannya dikenal sebagai propinsi seberang lautan Portugis, adalah negara Afrika yang paling baru dan termasuk negara kecil dan terbelakang.

1. Letak dan wilayahnya

Negara baru itu terletak di Afrika Barat antara Republik Guinea di sebelah Selatan dan Senegal di sebelah Utara. Seluruh wilayahnya, termasuk daerah pesisir rendah yang pada waktu pasang di- genangi air laut, adalah seluas 36,125 km², kurang dari sepertiga pulau Jawa. Kecuali sedikit dataran tinggi di perbatasan dengan Guinea, wilayah itu adalah tanah rendah. Daerah pesisir penuh dengan rawa mangrove dan hutan lebat, sedangkan daerah pedalaman adalah savanah¹.

2. Penduduk

Pada tahun 1969 penduduknya berjumlah 550.000 orang. Pusat utamanya ialah ibukota Bissau, yang didiami sekitar 80.000 orang, termasuk mereka yang mengungsi dari daerah pertempuran selama perang kemerdekaan. Kini jumlah penduduk itu diperkirakan 600.000 orang, 60.000 orang di antaranya tinggal di negeri-negeri tetangganya, Guinea dan Senegal sebagai pengungsi.

Rakyat Guinea Bissau itu bukanlah suatu kesatuan homogen, tetapi terdiri atas berbagai kelompok. Penduduk pribumi terdiri dari sekitar 20 suku. Yang besar ialah suku Balante (30%), suku Fula atau Fulani (20%), suku Mandyako (15%), suku Malinke atau Mandingo (12,5%) dan suku Popel (7%). Karena iklim daerah pesisir yang kurang sehat, di masa lampau tidak banyak orang kulit putih menetap di negeri itu. Sampai akhir tahun 1920-an penduduknya bukan negro kurang dari 1.000 orang. Sejak permulaan kebanyakan pendatang adalah orang Indo dari kepulauan Cabo Verde. Sekitar tahun 1960 penduduk asing berjumlah sekitar 8.000 orang, sebagian besar pegawai negeri dan pedagang Portugis. Jumlah itu meningkat dengan kedatangan pasukan-pasukan Portugis yang pada tahun 1973 diperkirakan berjumlah 30.000 orang, termasuk 7.000 orang negro.

Dalam pergaulan sehari-hari digunakan sekitar 20 bahasa suku dan satu lingua franca, yaitu bahasa creole atau bahasa Portugis versi Cabo Verde, sebagai bahasa komunikasi antar suku. Akan tetapi baik pemerintah kolonial maupun kaum nasionalis berkampanye untuk menggunakan bahasa Portugis dalam pendidikan. Kenyataannya bahasa ini dijadikan bahasa resmi negara baru, paling tidak untuk sementara waktu.

¹Cf. "Guinea Bissau", dalam Africa South of the Sahara 1973 (London, 1973), hal. 375.

Adanya banyak suku yang ke dalam menuntut loyalitas para warga dan ke luar kerap kali bersaing satu sama lain itu merupakan salah satu ciri struktur sosial Guinea Bissau. Selain itu sebagai akibat gerakan kemerdekaan terjadi semacam polarisasi antara suku yang loyal terhadap Pemerintah Portugis dan suku-suku yang memihak kaum nasionalis. Orang-orang Portugis menemukan sekutu-sekutu mereka yang paling tangguh di kalangan suku Fulani dan Malinke yang beragama Islam, sedangkan pejuang-pejuang PAIGC sebagian besar berasal dari suku Balante, golongan asimilado dan golongan Indo keturunan Cabo Verde¹.

3. Perekonomian

Perekonomian Guinea Bissau masih terbelakang. Sebagian terbesar rakyat hidup dari pertanian subsistensi dan belum banyak mengenal ekonomi uang. Beras merupakan bahan pangan pokok, yang di desa-desa dilengkapi dengan jagung, singkong, kacang tanah dan ubi manis. Produksi beras mencapai sekitar 170.000 ton setahun. Selama perang kemerdekaan Pemerintah Portugis dan PAIGC berlomba untuk memajukan pertanian, khususnya produksi beras, sebagai salah satu usaha untuk merebut hati rakyat.

Guinea Bissau mengekspor kacang tanah, yang ditanam di daerah pedalaman, dan kopra yang dihasilkan daerah pesisir dan pulau-pulau. Pada tahun 1968 ekspor kacang tanah adalah seharga 51 juta eskudos (sekitar 850 juta rupiah) dan ekspor kopra 25 juta eskudos (sekitar 400 juta rupiah). Sebaliknya Guinea Bissau mengimpor hampir seluruh keperluan akan barang industri, karena dalam negeri hampir belum ada industri.

Peternakan terdapat di kalangan suku Balante di pedalaman. Pada tahun 1967 terdaftar sekitar 230.000 ekor lembu, 143.000 ekor kambing, 93.000 ekor babi dan 53.000 ekor domba. Dagingnya adalah untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan sebagian kulitnya diekspor.

¹Tentang penduduk Guinea Bissau lihat Irene S. van Dongen, "Physical, human and economic setting", dalam David M. Abshire dan Michael A. Samuels (Ed.), Portuguese Afrika. A Handbook (New York Washington - London, 1969), hal. 20; "Guinea Bissau", loc. cit. hal. 375-376.

Industrialisasi belum dimulai kecuali dalam bidang pengolahan pangan dan bangunan. Kenyataannya Guinea Bissau selama ini mempunyai suatu perekonomian perang yang dipaksakan atas perekonomian pertanian yang sebagian besar hasilnya dibeli dan dijual oleh suatu perusahaan dagang Portugis, *Compania Uniao Fabril*, dan pedagang-pedagang setempat. Sebagitu jauh diketemukan bauxit, minyak dan mineral lain-lain, tetapi eksploitasinya dihambat oleh keadaan militer dan politik yang tidak menentu selama peperangan¹.

4. Fokus perjuangan kemerdekaan

Diarpun yang paling miskin dan tak berarti dari segi ekonomi di antara ketiga negeri jajahan Portugis di Afrika, Guinea Bissau telah menjadi fokus perjuangan untuk menumbangkan dominasi minoritas kulit putih di benua itu. Sedangkan gerakan-gerakan kemerdekaan di negeri-negeri lain lemah karena tidak hanya lemah organisasinya tetapi juga terpecah belah dan saling bermusuhan, PAIGC adalah satu-satunya partai yang aktif di Guinea Bissau dan memiliki suatu organisasi politik maupun militer yang baik, sehingga mudah diakui sebagai satu-satunya wakil rakyat negeri itu. Seperti akan kita lihat kemudian, Pemerintah Portugis mengadakan perundingan-perundingan dengan PAIGC dan akhirnya menyerahkan kekuasaan kepadanya².

II. Perjuangan kemerdekaan

Guinea Bissau mendapatkan kemerdekaannya lewat suatu perjuangan yang sengit. Portugal memandangnya sebagai bagian integral wilayahnya. Kepada penduduk diberikan kesempatan untuk mendapatkan persamaan hak dengan orang-orang Portugis sebagai *assimilado*, biarpun de facto hanya sedikit orang pribumi memperoleh status itu karena persyaratannya berat. Pada tahun 1961 kepada semua penduduk diberikan hak untuk menjadi warga negara Portugis. Setiap orang yang mendaftarkan diri di kantor catatan sipil memperoleh hak kewarganegaraan dan jika memenuhi persyaratannya juga hak suara.

¹Cf. "Guinea Bissau", *loc. cit.*, hal. 376.

²Cf. Partido Africano por a Independencia do Guine e Cabo Verde (PAIGC) (Jerusalem, 1973), hal. 7.

Sesuai dengan gagasan itu Portugal menganggap sepi aspirasi kemerdekaan rakyat dan berusaha menumpas gerakan-gerakan kemerdekaan. Dengan demikian berkobarlah suatu peperangan yang bertahun-tahun lamanya dan berakhir dengan kemerdekaan negeri.

1. Gerakan kemerdekaan

Biarapun Guinea Bissau pada tahun 1951 mendapat status propinsi seberang lautan Portugis dan kepada penduduknya diberi kesempatan untuk memperoleh persamaan hak dengan orang-orang Portugis, timbulah di kalangan kaum terdidik suatu kesadaran nasional yang dengan cepat berkembang menjadi suatu gerakan kemerdekaan yang makin lama makin kuat dan makin meluas di kalangan rakyat. Mereka membentuk kelompok-kelompok rahasia kecil untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri mereka dan secara demikian lahirilah beberapa partai politik.

Pada tahun 1956 beberapa orang pemimpin rakyat mendirikan Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Cabo Verde (PAIGC) sebagai suatu organisasi di bawah tanah untuk menggerakkan tukang-tukang dan buruh-buruh di kota-kota agar melancarkan demonstrasi-demonstrasi untuk menuntut hak penentuan diri dan kemerdekaan. Ketika polisi Portugis pada tahun 1959 menindak dengan kejam pemogokan buruh-buruh dok di Pigniguiti, PAIGC merubah strategi perjuangannya dan mulai suatu kampanye untuk mengembangkan kesadaran penduduk pedesaan. Kampanye itu mencapai suatu sukses yang gemilang berkat kepribadian dan perjuangan Sekjen partai Amilcar Cabral, yang mendirikan PAIGC bersama-sama dengan Raphael Barbosa. Karena kegiatannya di bidang pertanian, dia lebih terlibat dalam kehidupan penduduk pedesaan dan menyadari bahwa daerah pedalanan adalah penting bagi setiap program bagi Afrika.

Politik PAIGC memperjuangkan penggabungan Guinea Bissau dan Cabo Verde menjadi satu negara merdeka. Dari segi ekonomi dan strategi Guinea Bissau tidak banyak berarti, tetapi Cabo Verde mempunyai nilai strategi yang besar. Akan tetapi karena kecilnya wilayah, ruang gerak di Cabo Verde sangat terbatas, sehingga kaum nasionalis kepulauan itu tertarik pada PAIGC karena melihat Guinea Bissau sebagai batu loncatan bagi kemerdekaan negeri mereka. Dengan demikian kebanyakan pemimpin PAIGC adalah orang-orang Indo keturunan Cabo Verde, biarpun terdapat pula orang-orang dari daerah-daerah lain.

Selaras dengan strategi Cabral, PAIGC bergerak di tiga front, yaitu dalam negeri, dengan tetangga dan front internasional. Dalam negeri partai berusaha menanankan kesadaran politik pada rakyat, kemudian melancarkan perang gerilya dan suatu peperangan yang lebih luas, dan akhirnya melaksanakan rencana-rencana pembangunan pedesaan. Selain itu partai berusaha mendapatkan dukungan dan bantuan negeri-negeri tetangga, Guinea dan Senegal, yang diperlukan untuk meneruskan pemberontakan. Dengan maksud itu partai memerlukan tempat-tempat latihan, gudang senjata dan persediaan pangan. Khususnya partai berusaha agar diterima oleh Senegal, yang semula lebih senang dengan salah satu partai saingannya, Front untuk Pembebasan dan Kemerdekaan Guinea Portugis (FLING).

Front internasional tidak kurang pentingnya. Dana-dana yang berarti, supply senjata dan tekanan atas Portugal yang terus menerus hanya dapat diperoleh di kalangan internasional. Organisasi Persatuan Afrika setelah berkebangkit akan dapat menjadi sumber dukungan moral dan bantuan materiel. Senjata dan latihan militer diperlukan dan mudah didapat dari Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur.

Dalam usahanya untuk mendapatkan dukungan penduduk pedesaan, PAIGC menarik keuntungan dari keadaan pedesaan yang sampai saat itu diabaikan. Jalan-jalan hanya sedikit dan buruk sementara administrasi belum dikembangkan sewajarnya. Sambil menunggu masaknya kondisi dalam negeri dan kesempatan baik untuk melancarkan suatu ofensif terbuka, PAIGC perlahan-lahan menyusun suatu mekanisme partai sampai di desa-desa.

Partai merubah taktiknya dan pada tahun 1962 mulai melancarkan aksi-aksi sabotase yang kemudian disusul perang gerilya. Sukses yang dicapai pada permulaan memberi hati kepada pimpinan partai dan pada tahun 1964 dibentuknya suatu komando militer untuk seluruh negeri. Diarpun usaha pokok partai adalah dalam bidang militer, kegiatan-kegiatan sosial dan administratif juga memegang peranan penting. Sukses militer segera disusul dengan pembangunan sekolah-sekolah, Balai pengalihan, prasarana ekonomi dan lain sebagainya.

Setelah PAIGC berhasil mengembangkan suatu organisasi partai yang berarti, Amilcar Cabral menghidupkan kembali hubungan-hubungannya dengan kaum nasionalis di negeri-negeri jajahan Portugis lainnya yang kebanyakan dikonalnya ketika belajar di Portugal dan bekerja di Guinea Bissau. Usaha itu dipermudah setelah Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola (MPLA) pada tahun 1959 membuka kantor perwakilan di Konakry.

Gerakan nasionalis lain yang merupakan saingan-utama PAIGC ialah Front Pembebasan dan Kemerdekaan Guinea Portugis (FLING) yang lahir pada tahun 1953 sebagai gabungan lemah dari beberapa kelompok kecil, yaitu Gerakan Pembebasan Guinea (ILG), Persatuan Rakyat Guinea (UFG), Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Guinea (UFLG), Perhimpunan Demokrasi Afrika Guinea (RDAG) dan Persatuan Rakyat Pribumi Guinea Portugis (UNGP). Yang terakhir ini baru bergabung dengan FLING pada tahun 1963 dan menginginkan kemerdekaan tanpa revolusi dengan kekerasan.

Persaingan antara PAIGC dan FLING itu berlangsung di arena internasional sampai tahun 1967, akan tetapi PAIGC selalu lebih aktif daripada FLING. Organisasi Persatuan Afrika mula-mula berusaha untuk menyatukan kedua partai itu, tetapi pada tahun 1964 memutuskan untuk membantu partai yang aktif dalam pemberontakan. Demikianpun Pemerintah Senegal, yang kemudian lebih bekerjasama dengan PAIGC daripada dengan FLING yang mula-mula didukungnya.

Pada tahun-tahun 1965-1968 PAIGC meneruskan kampanyenya lewat siaran radio, di dalam negeri untuk membina kesadaran politik rakyat dan di luar negeri untuk mendapatkan pengakuan dan bantuan. Amilcar Cabral sendiri menjadi terkenal sebagai pejuang revolusioner Afrika yang paling berhasil.

Derbeda dengan gerakan-gerakan kemerdekaan lain, PAIGC mengutamakan organisasi politiknya tanpa mengabaikan organisasi militernya, yang dipecah menjadi tiga, yaitu satuan-satuan gerilya, militia dan tentara rakyat. Sementara pemimpin militernya mendapat latihan militer di RRC.

Pada tahun 1967 muncullah partai ketiga, Blok Demokrasi Guinea Bissau (BDG), yang mengatakan mewakili pegawai-pegawai negeri dan lain-lain dan menawarkan kesediaannya untuk membentuk suatu pemerintah koalisi dalam pengasingan dengan kedua partai lainnya. Akan tetapi seperti FLING, partai ini tidak ikut secara aktif dalam perang gerilya, sehingga PAIGC tampil kemuka sebagai satu-satunya partai nasionalis yang mendapat pengakuan dan dukungan internasional¹.

¹ Tentang gerakan kemerdekaan di Guinea Bissau lihat Michael A. Samuel, "The nationalist parties", di David M. Abshire dan Michael A. Samuels (Ed.), op. cit. hal. 398-401.

B. Perang gerilya

Oleh sebab pemerintah kolonial Portugis menentang gerakan kemerdekaan dan melarang partai-partai politik kecuali partai pemerintahan Uni Nasional yang kemudian dirubah namanya menjadi Aksi Nasional Rakyat, pemimpin-pemimpin nasionalis yang tidak dimasukkan penjara sebagai tahanan politik bergerak di bawah tanah atau lari ke luar negeri untuk menyusun kekuatan dan pada saatnya melancarkan perang kemerdekaan dari wilayah negara-negara tetangga yaitu Senegal dan Guinea.

Setelah mengalami kegagalan sebagai suatu organisasi di kota-kota, PAIGC menempuh dua jalan untuk mencapai tujuannya. Di satu pihak mulai latihan politik dan militer di negeri tetangga, Guinea, dan di lain pihak berusaha memperluas kekuatan politiknya secara rahasia dengan membentuk sel-sel di daerah pedesaan Guinea Bissau itu sendiri. Dulun Juli 1961 partai masih sibuk dengan konsolidasi organisasinya ketika salah satu partai saingannya, melancarkan suatu serangan atas kota-kota perbatasan dengan Senegal. Akan tetapi serangan itu tidak diulangi dan sejak itu PAIGC adalah satu-satunya partai yang aktif melawan pemerintah kolonial Portugis.

Pada pertengahan tahun 1962 PAIGC merasa bahwa persiapannya telah memadai dan memulai perang gerilya. Satuan-satuannya beroperasi dari wilayah Guinea dan melakukan sabotase terhadap fasilitas-fasilitas perhubungan. Selain itu juga melancarkan serangan-serangan di daerah-daerah di mana kekuatan Portugis adalah lemah. Pada tahun 1963 mereka memperbanyak serangan atas fasilitas-fasilitas tentara Portugis dan kadang-kadang juga menyerang kota-kota.

PAIGC menggunakan dua cara untuk mengobarkan pemberontakan. Kelompok-kelompok kecil melintasi perbatasan dari jurusan Selatan dan mengumpulkan penduduk di hutan-hutan dan menekan mereka, kadang-kadang dengan ancaman-ancaman, agar bergabung dengan mereka dan bertempur melawan pasukan-pasukan Portugis. Selain itu mereka membentuk organisasi partai di tingkat desa.

Ketika PAIGC memulai perang gerilya, pemerintah kolonial hanya mempunyai dua kompani di propinsi itu dan tidak mempunyai pasukan-pasukan secukupnya untuk mempertahankan pusat-pusat yang penting. Derbulan-bulan para pemberontak menguasai wilayah yang luas yang membujur dari ibukota Bissau ke jurusan Selatan dan

Diturun ke arah perbatasan dengan Guinea. Untuk menghindari pertempuran-pertempuran, beribu-ribu orang mengungsi ke negeri tetangga itu.

Untuk menghadapi pemberontakan itu pemerintah kolonial segera mendatangkan pasukan-pasukan baru dari Portugal dan mengangkat Jendral Arnaldo Schults, yang berhasil menumpas pemberontakan di Angola, sebagai gubernur jendral dan panglima tertinggi. Sebagai akibatnya, untuk sementara waktu kaum gerilyawan mengalami kemunduran. Tempat-tempat administrasi dan tangsi-tangsi diduduki kembali dan penduduk yang mengungsi diberi hati untuk kembali ke desa-desa mereka dan membangunnya kembali dengan bantuan Portugis. Pada tahun 1965 keadaan militer menjadi mantab. Para pemberontak memiliki inisiatif militer yang kuat dan terus beroperasi dengan leluasa, tetapi pusat-pusat penduduk dikuasai pasukan-pasukan Portugis yang juga mampu memasuki semua daerah kecuali pulau Komo, benteng pemberontak di daerah rawa-rawa di sebelah Selatan Bissau.

Di distrik tengah, di sebelah Timur Bissau, kelompok-kelompok kecil gerilyawan beroperasi dari tempat-tempat persembunyian di hutan-hutan dan mengambil taktik merinjau jalan-jalan dan menjebak pasukan-pasukan Portugis. Apabila ada informasi yang pasti, orang-orang Portugis melakukan pengejaran, tetapi jarang terjadi kontak senjata, biarpun kadang-kadang mereka menemukan penimbunan senjata. Operasi-operasi militer Portugis sangat dihambat oleh sukarnya lalu lintas, biarpun pada tahun-tahun belakangan ini banyak dibangun jalan dan lapangan-lapangan terbang di daerah-daerah.

Dalam rangka menumpas pemberontakan itu, pemerintah kolonial Portugis memberikan 10.000 pucuk senapan kepada kepala-kepala suku Fula dan beberapa suku lainnya yang tetap loyal kepada Portugal, tidak hanya untuk mendapatkan bantuan, tetapi juga untuk menolak klaim para gerilyawan bahwa mereka mendapatkan dukungan seluruh penduduk. Selain itu pemerintah kolonial merekrutir sukarelawan-sukarelawan Afrika untuk membela desa-desa mereka dan membentuk suatu militia lokal sebagai pasukan-pasukan bantuan.

Tindakan orang-orang Portugis lain ialah membangun benteng-benteng di tempat-tempat kunci sepanjang perbatasan Tenggara untuk menutup jalan-jalan infiltrasi para pemberontak dari wilayah Guinea, akan tetapi mereka tidak berhasil menghentikan infiltrasi itu, karena para gerilyawan selalu menemukan jalan lain lewat hutan-hutan. Alasan lain bagi orang-orang Portugis untuk menempatkan pasukan-pasukan dekat perbatasan itu ialah melindungi penduduk dan memberi hati kepada mereka agar kembali dari pengungsian.

Dengan maksud itu pula mereka menyajikan fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan dan bahan-bahan pokok, dan membantu rakyat berocok tanam dan membangun rumah-rumah baru. Sasaran utama kampanye pasifikasi itu ialah merebut hati rakyat.

Di bawah pimpinan Jendral Schultz tersebut, orang-orang Portugis di banyak tempat mendirikan desa setengah benteng atau desa yang diperkuat. Biasanya pasukan-pasukan Portugis memasuki desa kosong dan mengamankan diri terhadap serangan dengan menancapkan pagar ganda kawat berduri di kelilingnya, yang dilengkapi dengan tanda bahaya. Kemudian mereka membangun suatu garis pertahanan dalam yang terdiri atas kubu-kubu dari kayu dan tanah, bunker-bunker dan tempat perlindungan di bawah tanah terhadap tembakan-tembakan mortir dan roket. Umumnya penduduk akan kembali secara berangsur-angsur sampai menjadi lengkap kembali. Sesudah itu orang-orang Portugis membangun suatu desa baru di luar perimeter pertahanan sebagai lambang hidupnya kembali kepercayaan atas tertib dan hukum. Desa itu biasanya dibangun secara permanen dan dilengkapi suatu mesjid, sekolah dan balai pengotatan, dan memiliki suatu pasukan sukarelawan Afrika di bawah pimpinan kepala desa. Tidak semua desa serupa itu mempunyai garnisun Portugis, tetapi selalu dapat berhubungan lewat radio dengan suatu garnisun yang mengirimkan alat bantuan jika ada bahaya. Desa-desa itu kerap kali mampu menangkis serangan gerilyawan tanpa bantuan.

Selain memberikan keamanan, kehadiran pasukan-pasukan Portugis juga membawa banyak keuntungan ke pedalaman seperti fasilitas-fasilitas perhubungan dan pengangkutan, perumahan dan dinas-dinas yang lebih baik. Seperti di Angola, juga di Guinea Bissau lebih banyak kemajuan dicapai sesudah pecahnya peperangan daripada sebelumnya.

Sistem pertahanan Portugis itu ternyata efektif dan merupakan jawaban Portugis atas klaim para gerilyawan bahwa mereka menguasai sepertiga sampai dua pertiga wilayah Guinea Bissau. Hal itu telah mendorong PAIGC pada tahun 1965 untuk mengumumkan suatu program pembangunan di daerah-daerah yang dikuasainya. Pelaksanaan program itu menunjukkan kemampuan organisasi para gerilyawan dan keberhasilan mereka untuk mendapatkan dukungan rakyat di daerah-daerah itu.

Pada tahun 1966 kemajuan PAIGC terus menanjak dan kekuatan militer kedua pihak meningkat. Jumlah gerilyawan meningkat dari beberapa ratus orang pada tahun 1962 menjadi 3.000 orang pada tahun 1964, 6.000 orang pada tahun 1966 dan sekitar 107.000 orang

Menjelang akhir perang gerilya. Sejalan dengan perbaikan dalam organisasi, persenjataan, perlengkapan, taktik dan disiplin, mutu mereka meningkat pula. Dalam periode yang sama kekuatan Portugis meningkat menjadi 20.000 sampai 30.000 orang pasukan reguler dan 6000 kompani militia setempat selain pasukan-pasukan sukarelawan sipil yang disusun sebagai kelompok-kelompok bela diri di desa-desa.

Pasukan-pasukan PAIGC mendapatkan latihan permulaan di pangkalan di Kindia Guinea, yang mula-mula mempunyai suatu staf instruktur Soviet, yang kemudian digantikan orang-orang Aljazair. Di pangkalan itu para gerilyawan yang menerima supply dan senjata, termasuk basoka, mortir, senapan mesin dan sebagainya yang berasal dari Eropa Timur dan Cina.

Pada tahun 1967 PAIGC mencapai suatu modus vivendi dengan pemerintah Senegal yang sebelumnya di pihak FLING, sehingga dapat menggunakan wilayahnya. Kebanyakan serangan dari Senegal dilancarkan lewat perbatasan Utara dan datang dari pangkalan di Kolda, yang lambat laun menggeser kedudukan pangkalan di Kindia sebagai pusat latihan dan supply PAIGC yang utama, biarpun markas besar Amilcar Cabral tetap di Konakry. Beberapa alasan rupanya telah mendorong PAIGC untuk melakukan pergeseran itu, yaitu kegagalan merebut hati suku-suku di Selatan, perbaikan sikap pemerintah Senegal, keadaan di Senegal yang lebih baik bagi para pengungsi, dan keadaan Guinea Bissau Utara yang lebih menjamin kehidupan.

Menjelang akhir tahun 1967 Amilcar Cabral mengatakan bahwa PAIGC menguasai separuh negeri dan beberapa peninjau Barat yang atas undangannya mengunjungi daerah-daerah yang telah dibebaskan itu membenarkan klaim tersebut. Mereka juga memperkuat laporan para gerilyawan bahwa mereka menguasai lebih dari separuh desa-desa dan daerah pedesaan, beroperasi di sebagian terbesar negeri dengan sukses dalam satuan-satuan gerilya, dan mulai mengepung kota-kota kecuali dua atau tiga yang paling besar. Akan tetapi pasukan-pasukan Portugis masih memiliki kemampuan untuk melancarkan ofensif pembalasan, terutama karena memiliki pesawat-pesawat tempur jet yang dalam waktu beberapa menit dapat mencapai semua bagian negeri. Kenyataannya, pada tahun 1974 Portugal masih bertahan di Guinea Bissau dan masih akan tetap bertahan kalau pemerintah baru tidak melepaskan politik kolonial pemerintah sebelumnya.

Apabila orang-orang Portugis masih bertahan di Guinea Bissau, hal itu bukan hanya berkat kekuatan militer mereka, melainkan juga karena kesediaan paling tidak sebagian penduduknya untuk bekerjasama dengan pemerintah Portugis. Loyalitas mereka itu merupakan

salah satu alasan yang diberikan orang-orang Portugis untuk bertahan dalam arti bahwa mereka merasa wajib melindungi penduduk yang loyal itu. Diarpun klaim kaum nasionalis bahwa mereka menguasai lebih dari separuh negeri adalah benar, hal itu tidak berarti bahwa mereka juga menguasai separuh penduduk karena sebagian besar penduduk tinggal di kota-kota atau desa-desa yang dijadikan setengah benteng tersebut di bawah perlindungan Portugis. Faktor lain dalam tekad Portugis itu ialah tradisi Portugal, kepentingan-kepentingan ekonomi Companhia Uniao Fabril, dan rasa takut akan konsekwensi-konsekwensinya bagi Angola dan Mozambique¹.

3. Proklamasi kemerdekaan Guinea Bissau

Pada tahun 1971 Amilcar Cabral mengatakan telah menyusun suatu pemerintahan sipil di daerah-daerah yang telah dibebaskan yang mengurus sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, poliklinik-poliklinik, dinas-dinas sosial, pusat-pusat komersial dan pengadilan-pengadilan. Mengelak akhir 1972 PAIGC melaporkan telah mendaftar 58.000 orang pemilih dan melangsungkan pemilihan 15 dewan regional yang bersama-sama mempunyai 240 orang anggota. Dewan-dewan itu kemudian mengadakan suatu pertemuan dan memilih 72 orang yang akan duduk dalam Majelis Nasional Rakyat (Parlemen) bersama-sama dengan 5 orang wakil serikat-serikat buruh, 3 orang wakil mahasiswa dan 40 orang yang ditunjuk. Pembentukan parlemen itu direncanakan sebagai satu langkah menuju proklamasi kemerdekaan yang akan dilangsungkan pada tahun 1973.

Pembunuhan Amilcar Cabral di Konakry pada bulan Januari 1973 tidak menghambat pelaksanaan rencana itu. Wakilnya Aristides Pereira ditunjuk sebagai Pejabat Sekjen partai dan kemudian dikukuhkan Kongres partai sebagai Sekjen.

Pada bulan Juli 1973 PAIGC melangsungkan kongresnya yang kedua - yang pertama diadakan pada tahun 1964 - di wilayah Guinea Bissau yang telah dibebaskan, yang dihadiri 138 orang wakil dan 60 orang peninjau. Kongres antara lain meninjau kembali Anggaran Dasar partai, sedikit merubah susunan partai, mengukuhkan Pereira sebagai Sekjen dan memilih Joao Vieira dan Francisco Mendes menjadi anggota Sekretariat Permanen di samping Aristides Pereira dan Luis Cabral. Kongres juga memutuskan, bahwa Majelis Nasional Rakyat akan mengadakan sidangnya yang pertama pada tahun itu juga dan memproklamasikan kemerdekaan Guinea Bissau.

¹Cf. George Martelli, "Conflict in Portuguese Africa", dalam David M. Abshire dan Michael A. Samuels (Ed.), *op. cit.* hal. 415-420.

Sesuai dengan keputusan itu, pada tanggal 23-24 September 1973 Majelis Nasional Rakyat mengadakan sidangnya yang pertama di Madina Doe, Guinea Bissau Selatan. Pada tanggal 24 September Sidang berproklamkan Republik Guinea Bissau, menyatakan Amilcar Cabral secara anumerta sebagai pendiri negara dan menetapkan bendera dan lagu kebangsaan. Selain itu Sidang memilih suatu Dewan Negara di bawah pimpinan Luis Cabral dan suatu Dewan Eksekutif 16 orang di bawah pimpinan Francisco Mendes, yang dalam kedudukannya itu berfungsi sebagai Perdana Menteri. Luis Cabral selanjutnya diangkat sebagai Presiden Guinea Bissau, dan sekali lagi Aristides Pereira diukuhkan sebagai Sekjen Partai.

Dalam proklamasi kemerdekaan itu, PAIGC menekankan pentingnya meneruskan perang kemerdekaan bersama-sama dengan wilayah-wilayah jajahan Portugis lainnya dan menyatakan tekadnya untuk menyatukan Kepulauan Cabo Verde dengan Guinea Bissau menjadi satu negara dan sehubungan dengan itu menyatakan bersedia mengadakan perundingan-perundingan dengan Pemerintah Portugis untuk mengakhiri peperangan dan mengadakan hubungan-hubungan baru atas dasar kemerdekaan dan persamaan¹.

Proklamasi kemerdekaan Guinea Bissau itu disambut dengan gembara oleh negara-negara anti kolonial, khususnya mereka yang ikut memperjuangkannya. Satu demi satu negara-negara itu mengakui negara baru itu. Pengakuan PBB bulan Nopember berikutnya disusul penyakuan banyak negara lainnya. Akan tetapi Pemerintah Portugal tidak mau tahu menahu dan meneruskan perang kolonialnya. Namun sementara itu di kalangan angkatan bersenjata timbulah suatu keyakinan bahwa perang kolonial tidak akan mencapai sasarannya dan oleh sebab itu harus diakhiri segera mungkin dan disusul dengan suatu penyelesaian politik. Keyakinan itu meluas dan lambat laun menjadi suatu gerakan yang akhirnya berhasil menumbangkan rejim Saetano dan menggantinya dengan pemerintah baru di bawah pimpinan Jendral De Spínola, yang segera melepaskan politik kolonial dan memulai proses dekolonisasi.

4. Penyelesaian politik

Dengan berhasilnya kudeta militer di Portugal tanggal 25 April 1974 perjuangan kemerdekaan Guinea Bissau memasuki suatu tahap baru. Oleh sebab kudeta tidak hanya dilancarkan untuk mengembalikan hak-hak sipil dan demokrasi di Portugal tetapi juga untuk

¹Cf. Antara, 27 September 1973; Partido Africano por a Independência do Guiné e Cabo Verde, hal. 8-9.

mengakhiri perang kolonial yang tidak hanya gagal mencapai sasarannya tetapi juga merupakan suatu bencana bagi Portugal, pemerintah baru segera mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri perang kolonial dan mencari suatu penyelesaian politik bagi sengketa nya dengan kaum nasionalis. Pemerintah menyatakan mengakui hak rakyat negeri-negeri jajahannya untuk menentukan nasibnya sendiri dan sesuai dengan itu mengusulkan suatu referendum. Pemerintah bersedia menerima konsekwensi-konsekwensinya, termasuk mengakui kemerdekaan apabila rakyat yang bersangkutan menghendakinya. Sehubungan dengan itu Pemerintah berseru kepada organisasi-organisasi gerilyawan agar meletakkan senjata dan mengakhiri peperangan, kembali ke negeri masing-masing dan menoruskan perjuangan mereka sebagai partai politik. Pemerintah juga menawarkan perundingan-perundingan dengan mereka untuk mencari suatu penyelesaian damai¹.

Pemimpin-pemimpin PAIGC menyambut pergantian pemerintah Portugis dan angin baru di Lisabon itu dengan gembira, tetapi menyatakan tidak puas dengan otonomi yang ditawarkan itu. Partai menuntut agar Portugal mengakui Kemerdekaan Republik Guinea Bissau yang telah diproklamirkan dan diakui PBB dan banyak negara itu, dan menyatakan akan menoruskan perang gerilya sampai sasaran itu tercapai, akan tetapi bersedia untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan Portugal².

Pada tanggal 25 Mei 1974 dimulai perundingan-perundingan antara Portugal dan PAIGC sebagai wakil rakyat Guinea Bissau, yang belum memberikan hasil yang diharapkan karena posisi kedua pihak masih jauh satu sama lain. Delegasi Portugal menghendaki suatu penyelesaian berangsur-angsur, dimulai dengan gencatan senjata yang akan disusul dengan partisipasi PAIGC dalam kegiatan politik dan referendum untuk menentukan hari depan negeri. Sebaliknya PAIGC mengajukan beberapa syarat politik bagi gencatan senjata, portabilitas pengakuan Republik Guinea Bissau dan penggabungan Cabo Verde dengan Guinea Bissau. Usul referendum ditolakny dengan tegas. Diarepun pada perundingan-perundingan itu belum dicapai sepakat kata kecuali untuk meneruskannya setelah masing-masing meninjau kembali posisinya, dilangsungkannya perundingan-perundingan itu sendiri telah merupakan suatu kemajuan dan suatu kemenangan bagi PAIGC. Secara implisit partai diakui sebagai wakil rakyat Guinea Bissau yang sah. Lagi pula pihak yang satu dapat mengenal pihak yang lain dan argumen-argumen yang mendasari posisinya³.

¹Berita AFP yang dikutip Indonesian Observer, 13 Mei 1974.

²Cf. Indonesian Observer, 15 Mei 1974.

³Cf. Antara, 29 Mei 1974.

Perundingan babak kedua dilangsungkan di Aljasair pada pertengahan bulan Juli. Posisi kedua pihak telah menjadi lebih lunak, tetapi masih terdapat suatu perbedaan tafsir arti penentuan diri (self determination) yang belum dapat diatasi. Bagi Portugal penentuan diri dapat berarti otonomi atau kemerdekaan sesuai dengan kemauan rakyat. Akan tetapi bagi PAIGC penentuan diri hanya berarti kemerdekaan penuh. Perundingan-perundingan berakhir tanpa mencapai hasil yang definitif. Kedua delegasi akan bertemu lagi setelah mengadakan pembicaraan dengan pemerintahnya¹.

Sebelum perundingan-perundingan diteruskan, Pemerintah Portugis meninjau kembali sikapnya dan mengambil suatu posisi yang kiranya dapat diterima kaum nasionalis. Pada tanggal 27 Juli 1974 Presiden De Spinoza mengumumkan keputusan pemerintah kepada rakyat Portugis. Portugal akan segera mulai proses menyerahkan kekuasaan di koloni-koloninya di Afrika. Suatu undang-undang konstitusional telah diundangkan sebagai dasar hukum yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahan yang berdasarkan konstitusi tahun 1933 adalah bagian integral negara. Telah tiba saatnya bagi Presiden Republik untuk mengukuhkan hak semua bangsa wilayah-wilayah seberang lautan Portugis atas penentuan diri, termasuk segera mengakui hak mereka atas kemerdekaan. Portugal terbuka bagi inisiatif mereka untuk memulai pekerjaan merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan proses dekolonisasi, bersama-sama dengan penerimaan hak atas kemerdekaan politik, yang akan diumumkan dengan syarat dan pada saat yang akan disetujui². Dua hari kemudian Presiden De Spinoza mengumumkan bahwa Guinea Bissau akan mendapatkan kemerdekaan lebih dahulu dan sesudah itu Portugal akan mengalihkan perhatiannya atas Mozambique dan Angola³.

Menanggapi pernyataan De Spinoza itu, pada tanggal 27 Juli 1974 Presiden Guinea Bissau Luis Cabral antara lain mengatakan bahwa pidato Presiden De Spinoza itu menghapus rintangan-rintangan dan kesukaran-kesukarannya dan oleh sebab itu dapat dicapai secepat kata. Akan tetapi ditambahkan bahwa PAIGC tidak dapat menerima gagasan referendum di Guinea Bissau⁴.

¹Cf. Antara, 20 Juni 1974.

²Berita UPI yang dimuat The Indonesia Times, 29 Juli 1974.

³Berita AP yang memuat The Indonesia Times, 30 Juli 1974.

⁴Berita AP yang dikutip The Indonesia Times, 30 Juli 1974.

Dengan demikian perundingan-perundingan babak ketiga yang dilangsungkan di Aljazair pada tanggal 23-26 Agustus 1974 dapat berjalan dengan lancar dan pada tanggal 26 Agustus menghasilkan suatu persetujuan perdamaian, yang menetapkan gencatan senjata, penarikan pasukan-pasukan Portugis sebelum tanggal 31 Oktober 1974, demobilisasi pasukan-pasukan Portugis yang berkebangsaan Afrika, pengakuan kemerdekaan Guinea Bissau dan penyerahan kekuasaan pada tanggal 10 September 1974, kerjasama atas dasar kemerdekaan, persamaan, saling menghormati dan saling menguntungkan, dan suatu referendum di Cabo Verde. Portugal juga menjanjikan akan menורותkan bantuannya untuk pembangunan Guinea Bissau¹.

Sesuai dengan persetujuan itu pada tanggal 10 September 1974 Presiden De Spinoza mengumumkan kemerdekaan Guinea Bissau dan menyerahkan kekuasaan kepada PAIGC². Sebelumnya gencatan senjata telah dimulai. Demikianpun penarikan pasukan-pasukan Portugis dan demobilisasi pasukan-pasukan Afrika. Dengan demikian berakhirilah konflik antara Portugal dan kaum nasionalis Guinea Bissau lewat suatu penyelesaian politik yang menguntungkan kedua pihak dan menjamin adanya kerjasama.

Pengakuan kemerdekaan Guinea Bissau itu adalah hasil berbagai faktor. Perang gerilya yang dilancarkan PAIGC dan yang makin lama makin efisien sejalan dengan perbaikan organisasi, disiplin, latihan, logistik, taktik dan persenjataan, tekanan internasional yang semakin meningkat, dan keyakinan Pemerintah baru Portugal bahwa peperangan di Afrika tidak dapat diselesaikan secara militer dan oleh sebab itu harus diakhiri dan diselesaikan secara politik, semuanya itu telah mendorong Portugal untuk melepaskan politik kolonialnya dan memulai suatu proses dekolonisasi. Dengan perkataan lain, pengakuan kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan kaum nasionalis Guinea Bissau dan kekuatan-kekuatan anti kolonial di satu pihak dan hasil politik baru Portugal di lain pihak.

5. Pengaruh kemerdekaan Guinea Bissau

Pengakuan kemerdekaan Guinea Bissau itu rupanya akan mempercepat proses dekolonisasi, khususnya negeri-negeri jajahan Portugis lainnya³. Kejadian itu menunjukkan bahwa Pemerintah Portugis adalah

¹Berita Antara, 27 Agustus 1974.

²Cf. Antara, 11 September 1974; berita AEP yang dimuat Indonesian Observer, 13 September 1974.

³Cf. Pernyataan Duncan Cambell, wakil Australia di PBB, yang dikutip Kompas, 28 Agustus 1974.

sungguh-sungguh ketika menyatakan mengakui hak bangsa-bangsa jajahannya atas penentuan diri dan bersedia menerima konsekwensi-konsekwensinya, termasuk mengakui kemerdekaan apabila bangsa yang bersangkutan menghendaknya. Pemerintah Portugal telah melepaskan politik kolonialnya dan menginginkan hubungan-hubungan baru dengan negeri-negeri bekas jajahannya atas dasar kemerdekaan, persamaan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Sebagai akibatnya sikap kaum nasionalis akan menjadi lebih lunak dan lebih luwes pula, sehingga perundingan-perundingan antara mereka dan Portugal akan memberikan hasil yang diharapkan.

De facto perundingan-perundingan antara Portugal dan FRELIMO sebagai wakil rakyat Mozambique berjalan dengan lancar dan pada tanggal 7 September 1974 ini menghasilkan suatu persetujuan kemerdekaan yang mengakhiri peperangan di negeri itu. Berdasarkan persetujuan itu gencatan senjata dimulai malam itu juga, kekuasaan diserahkan kepada suatu pemerintah sementara yang akan dipimpin seorang Perdana Menteri yang ditunjuk FRELIMO, suatu komisi militer gabungan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, dan seorang Komisaris Tinggi Portugis diangkat oleh Portugal. Pemerintah baru itu akan memegang kekuasaan sampai kemerdekaan Mozambique diresmikan pada tanggal 25 Juni 1975¹.

Pengakuan kemerdekaan Guinea Bissau dan prospek kemerdekaan Angola dan Mozambique itu merupakan suatu pukulan berat bagi rejim minoritas kulit putih di Rhodesia dan Afrika Selatan, tidak hanya karena penarikan pasukan-pasukan Portugis akan mengisolir mereka dan membuyarkan strategi pertahanan kulit putih di Afrika bagian Selatan, tetapi juga karena kejadian itu akan memberikan hati kepada rakyat Negro di kedua negeri itu, khususnya kaum nasionalis, untuk meningkatkan perjuangan kemerdekaan mereka, termasuk serangan-serangan gerilya. Bagi mereka terbuka dua kemungkinan, yaitu meningkatkan kemampuan militer mereka untuk menghadapi peningkatan perang gerilya itu atau mengakui hak-hak rakyat Negro dan membentuk suatu majority rule.

Selama ini strategi pertahanan rejim-rejim kulit putih di Afrika bagian Selatan itu didasarkan atas doktrin bahwa sungai Sambesi harus dipertahankan sebagai garis pemisah antara Afrika negro dan Afrika kulit putih, dan bahwa aspirasi-aspirasi dan kekuasaan negro harus dibatasi di negeri-negeri di sebelah Utaranya. Dalam rangka itu rejim Rhodesia dan Afrika Selatan mengadakan kerjasama erat dalam bidang pertahanan dan ekonomi dengan pemerintah

¹Cf. Antara, 10 September 1974.

kolonial Portugis. Dengan keputusan Portugal untuk memberikan kepada negeri-negeri jajahannya di Afrika itu strategi bersama itu buyar. Rhodesia dan Afrika Selatan kehilangan sekutu dan terpaksa menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan baru di kawasan itu.

Minoritas kulit putih di Rhodesia kini merasa terisolir dan terancam. Bahkan minoritas kulit putih di Afrika Selatan yang merupakan kubu pertahanan supremasi kulit putih di Afrika sudah tidak merasa aman terhadap kekuatan-kekuatan yang mengelilinginya. Kenyataannya; orang-orang di Pretoria mulai membicarakan kemungkinan meninggalkan Rhodesia dan memusatkan perhatian atas pertahanan wilayah mereka sendiri.

Rejim kulit putih di Rhodesia merasa akan dikopung oleh bangsa-bangsa negro yang merdeka dan menjadi korban isolasi politik dan ekonomi. FRELIMO telah mengancam akan memutuskan semua hubungan dengan rejim PM Smith, sehingga tinggal satu jalan kereta api sebagai penghubung dengan luar negeri. Rhodesia sedang membangun jalan kereta api lain ke Afrika Selatan tetapi jalan itu baru tahun depan akan selesai. Lagi pula Afrika Selatan tidak entusias dengan prospek itu, karena jaringan kereta apinya telah sangat sibuk untuk keperluannya sendiri.

Bahwa perang gerilya rupanya akan ditingkatkan juga menimbulkan kekhawatiran. Serangan-serangan gerilya telah merubah banyak rumah petani kulit putih di perbatasan Timur Laut menjadi benteng. Sebagai akibatnya banyak orang mulai meninggalkan negeri, khususnya orang-orang muda yang sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk dinas militer. Sementara itu arus imigrasi hampir berhenti sama sekali. Apabila Angola dan Mozambique menjadi pangkalan perang gerilya yang dilancarkan untuk menjatuhkan pemerintah PM Smith, emigrasi dari Rhodesia itu akan berkembang menjadi suatu eksodus. Untuk menghentikan pemberontakan rakyat negro itu, pemerintah menawarkan tambahan 6 kursi parlemen dan pengenderan perundang-undangan rasial, tetapi pemimpin-pemimpin negro sudah tidak bersedia menerimanya. Mereka menuntut majority rule.

Petunjuk lain bahwa supremasi kulit putih di Rhodesia hampir tamat riwayatnya ialah sikap Afrika Selatan. Setelah Portugal angkat kaki dari Afrika, Rhodesia sudah bukan perisai baginya. Schubungan dengan itu semakin banyak pemimpin Afrika Selatan merasa tidak dapat meneruskan bantuannya kepada Rhodesia, tidak hanya dalam bidang militer tetapi juga dalam bidang ekonomi dan politik.

Hi Vorster bahkan telah memberitahukan kepada PM Smith bahwa dia harus menyadari bahwa pemerintahan mayoritas negro tidak dapat dipegang¹.

Tengenai hari depan negeri mereka sendiri pendapat mereka adalah berbeda. Berlainan dengan koloni-koloni Eropah lainnya, yang tidak pernah mempunyai sejuta penduduk kulit putih, Afrika Selatan mempunyai sekitar 4 juta orang penduduk kulit putih. Mereka sama sekali tidak bermaksud memperluas politik pemisahan rasial mereka, tetapi meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan militer mereka. Dengan tegas mereka menolak anggapan bahwa mereka tidak berhak sepenuhnya untuk menguasai Afrika Selatan. De facto nenek moyang mereka telah berabad menetap di negeri itu. Mereka bahkan mengatakan dengan bangga telah dua kali melancarkan perang kemerdekaan melawan orang-orang Inggris yang menjajah mereka (perang Boer). Seperti dapat diperkirakan, sikap semacam itu mempercepat proses polarisasi dalam arti bahwa kekuatan moderat di kedua pihak makin berkurang dan kekuatan radikal makin kuat.

Jawaban minoritas kulit putih atas masalah rasial ialah pembangunan bantustan-bantustan, yaitu negeri-negeri otonom bagi suku negro masing-masing di wilayah negara. Setelah merdeka bangsa-bangsa negro itu akan hidup berdampingan dengan bangsa kulit putih atas dasar persamaan. Akan tetapi rakyat negro menolak pendapat itu dan mengemukakan, bahwa mereka hanya sebagian 13% wilayah Afrika Selatan padahal mereka jauh lebih banyak dari pada penduduk kulit putih, 4 lawan 1. Lagi pula sebagian besar wilayah itu adalah tanah kurus dan miskin, sedangkan minoritas kulit putih mengambil seluruh daerah yang berharga, termasuk tambang emas dan intan. Kelompok-kelompok etnis lainnya, yaitu sekitar 2 juta orang Indo (coloured) dan 620.000 orang Asia, dibiarkan mengambang di antara dua kelompok besar itu.

Eiarpun mengatakan bahwa politik apartheid itu akan memecahkan masalah rasial, pemimpin-pemimpin kulit putih lebih mengandalkan kekuatan militer mereka. Persenjataan Afrika Selatan meliputi pesawat-pesawat tempur dan pembom supersonik, sistem tanda bahaya hiper modern, tank-tank ringan, kendaraan berlapis baja, peluru-peluru kendali, helikopter-helikopter, pesawat-pesawat pengangkut dan suatu angkatan laut yang kecil tetapi efisien. Baru-baru ini pemerintah mengumumkan bahwa anggaran belanja untuk pertahanan ditingkatkan 50%. Embargo senjata yang diserukan PBB tidak berhasil

¹John Borrel, "Will Vorster dump Smith?", OFNS yang dimuat pada The New Standard, 19 Oktober 1974, p. 10.

menghentikan supply senjata dan minyak. Sebagai imbalan bagi uranium Perancis melengkapinya dengan segala macam senjata. Diarpun negara-negara Arab menghentikan supply minyak kepadanya, Iran meneruskan supplynya.

Dengan demikian boikot itu tidak mengurangi kekayaan dan kekuatan Afrika Selatan. Kedudukannya sekarang ini adalah sangat kuat. Akan tetapi mengingat bahwa Afrika negro bergerak ke jurusan Selatan dengan cepat dan dengan tekad yang bulat, sementara orang mulai meragukan kemampuan Afrika Selatan untuk membendung arus sejarah selama-lamanya. Kalau Rhodesia jatuh, kalau perang gerilya ditingkatkan secara drastis dengan bantuan negara-negara Afrika dan OAU, dan kalau rakyat negro meningkatkan perlawanannya, Afrika negro mungkin dapat menundukkan benteng perlawanan kulit putih itu. Kekuatan dapat membeli waktu, tetapi rejim minoritas kulit putih Afrika Selatan akhirnya akan terpaksa melepaskan politik apartheidnya dan membentuk majority rule atau bertempur sampai hancur¹.

III. Republik Guinea Bissau

Republik Guinea Bissau mempunyai lembaga-lembaga negara sebagai berikut. Seorang Presiden sebagai Kepala Negara, suatu pemerintahan di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri, suatu Majelis Nasional Rakyat sebagai parlemen dan suatu lembaga kehakiman. Akan tetapi sesuai dengan pola komunis yang dianutnya, kekuasaan sebenarnya adalah pada PAIGC, khususnya Kongres partai, yang memilih anggota-anggota Komite Sentral yang pada gilirannya memilih anggota-anggota Komite Eksekutif yang berfungsi sebagai biro politik.

Susunan PAIGC

Sesuai dengan pola komunis, dasar struktur sipil maupun militer PAIGC adalah Komite Sentral yang berfungsi sebagai dewan tertinggi. Pimpinannya dipusatkan pada Sekretariat Permanen, yang terdiri atas 4 orang, yaitu seorang Sekjen, seorang Wakil Sekjen dan dua orang anggota. Sekarang ini Sekjen partai ialah Aristides Pereira, Wakil Sekjen Luis Cabral yang ditangkap sebagai Presiden

¹ Cf. "White Africa's last stand", Newsweek, 16 September 1974.

Republik. Kedua anggota Sekretariat lainnya ialah Joao Vieira, Ketua Majelis Nasional Rakyat, dan Francisco Mendes, Ketua Dewan Komisaris atau Perdana Menteri.

Komite Sentral, yang sejak 1973 mempunyai 55 orang anggota, berfungsi sebagai parlemen bayangan dan mempunyai lima komisi, masing-masing untuk pengawasan, keamanan, hubungan luar negeri, pembangunan nasional dan organisasi serta orientasi partai. Berbeda dengan organisasi-organisasi gerilya lainnya, PAIGC selalu mengutamakan organisasi politik di atas organisasi militer. Pimpinan politik sekaligus juga merupakan pimpinan militer.

Selanjutnya Komite Sentral memilih Komite Eksekutif, yang berfungsi sebagai biro politik atau pemerintah bayangan dan kini terdiri dari 24 orang anggota. Suatu Dewan Kerang, terdiri atas anggota-anggota Komite Eksekutif, memimpin sayap militer partai, yaitu angkatan bersenjata revolusioner rakyat, yang meliputi satuan-satuan gerilya, tentara dan militia rakyat. Menurut perkiraan, PAIGC kini mempunyai sekitar 10.000 orang bersenjata yang terlatih.

Pada bulan Juli 1973 PAIGC mengadakan kongresnya yang kedua. Pada kesempatan itu susunan pimpinan sedikit dirubah dan Aristides Pereira, yang sejak pembunuhan Amilcar Cabral berfungsi sebagai penjabat Sekjen, dikukuhkan sebagai Sekjen. Kongres juga memutuskan, bahwa parlemen akan mengumumkan kemerdekaan Guinea Bissau pada sidangannya yang pertama.

Sistim partai tunggal

Seperti banyak negara Afrika lainnya, Guinea Bissau menganut sistim partai tunggal. Kekuasaan adalah pada PAIGC yang lahir dan berkembang sebagai partai nasionalis utama yang aktif melawan penjajahan sehingga diakui sebagai satu-satunya wakil rakyat dan dalam kedudukannya itu mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Portugis. Bertolak dari asumsi bahwa sistim partai tunggal itu adalah sistim yang paling baik untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Guinea Bissau, terutama karena merupakan mekanisme yang paling baik untuk menggalang persatuan nasional dan menggerakkan partisipasi rakyat dalam proses modernisasi dan pembangunan, pemimpin-pemimpin PAIGC menolak tuntutan partai-partai lain seperti FLING dan BDC untuk diikutsertakan dalam pemerintahan. Lagi pula PAIGC merasa cukup kuat untuk menghadapi perlawanan partai-partai tersebut.

Majelis Nasional Rakyat

Fungsi legislatif adalah pada Majelis Nasional Rakyat, yang terdiri dari 120 orang anggota, yaitu 72 orang pilihan dewan-dewan regional, 5 orang wakil serikat-serikat buruh, 3 orang wakil mahasiswa-mahasiswa, dan 40 orang yang ditunjuk oleh pimpinan partai. Ketuanya ialah Joao Vieira, anggota Sekretariat Permanen partai. Akan tetapi perranannya sebagai forum debat bagi kebijaksanaan pemerintah menjadi sangat berkurang. Majelis hampir semata-mata berfungsi untuk mengesahkan keputusan-keputusan partai, yang dipandang sebagai badan legislatif tertinggi karena dianggap mewakili seluruh rakyat. Haluan politik nasional tidak dibicarakan dan ditetapkan dalam parlemen, tetapi dalam Kongres partai. Demikianpun undang-undang tidak dipikirkan dan dibuat dalam parlemen, tetapi dalam Komite Sentral partai yang dengan tepat disebut parlemen bayangan.

Dewan Eksekutif

Dalam teori fungsi pemerintah adalah pada Dewan Eksekutif yang terdiri atas 16 orang komisaris dan sub komisaris di bawah pimpinan seorang ketua¹. Akan tetapi sama halnya dengan Majelis Nasional, dalam kenyataan peranannya tidak besar. Dewan hampir semata-mata berfungsi sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh Komite Eksekutif atau biro politik partai, yang oleh sebab itu juga disebut pemerintah bayangan. Dengan demikian pada analisa terakhir partailah yang menjalankan fungsi legislatif maupun eksekutif.

IV. Masalah-masalah dan prospek

Sebagai negara muda yang kecil, miskin dan terbelakang Guinea Bissau menghadapi banyak masalah, akan tetapi kiranya akan dapat mengatasinya secara berangsur-angsur, antara lain karena memiliki berbagai hal yang menguntungkan.

¹Ditambah menjadi 10 menteri dan 9 menteri muda (L. 10/9/74).

1. Masalah-masalah

Salah satu masalah penting yang dihadapi negara baru itu ialah penyaluran sekitar 15.000 orang bersenjata yang selama ini berdinam dalam angkatan bersenjata perang Portugis, khususnya serdadu-serdadu profesional di antara mereka¹. Dalam persetujuan tanggal 26 Agustus tersebut, Pemerintah Portugis berjanji akan mengadakan demobilisasi, tetapi dapat ditanyakan apakah mereka itu bersedia kembali ke kehidupan sipil. Kehadiran sekian banyak orang bersenjata dapat mengancam keamanan negara dan menimbulkan kekacauan. Paling tidak angkatan bersenjata Guinea Bissau menghadapi suatu tugas yang berat.

Masalah lain ialah Partai Front untuk Pembebasan dan Kemerdekaan Guinea Portugis (FLING) dan Partai Blok Demokrasi Guinea Bissau (BDG), yang tidak hanya berjeang untuk mempertahankan eksistensinya, tetapi juga untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan dalam pemerintahan, biarpun tidak pernah aktif melawan penjajah. Kedua partai itu tidak akan membiarkan PAIGC memonopoli kekuasaan tanpa mengadakan perlawanan.

Sumber kesukaran lain ialah kenyataan bahwa penduduk Guinea Bissau belum merupakan suatu bangsa yang kompak, tetapi terdiri atas lebih dari 20 suku yang tidak hanya terpisah satu sama lain tetapi juga saling bersaing dan bahkan bermusuhan. Perang kemerdekaan telah meningkatkan perpecahan dan permusuhan itu. Pemerintah kolonial mendapatkan pendukung-pendukung loyal di kalangan suku Fulani sedangkan pemimpin-pemimpin nasionalis banyak yang berasal dari suku Balanta. Kaum nasionalis selama perang kemerdekaan tidak hanya menghadapi orang-orang Portugis tetapi juga orang-orang suku yang loyal tersebut. Tidak mustahil permusuhan antar suku itu bahkan meningkat menjadi perang saudara seperti terjadi di Nigeria tahun 1967-1971. Untuk mengatasinya diperlukan suatu kebijaksanaan tinggi, terutama karena bekas pendukung-pendukung Portugal itu bersenjata.

Masalah lain yang tidak kurang beratnya ialah dalam bidang ekonomi. Seperti kita lihat di atas, Guinea Bissau adalah suatu negeri kecil yang miskin dan terbelakang. Mayoritas penduduknya masih terlibat dalam pertanian subsistensi dan belum banyak mengenal ekonomi uang. Kekayaan alam tidak banyak dan industri hampir belum ada. Lambat laun negeri akan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi dalam waktu dekat ini pangan merupakan suatu

¹Cf. Antara, 30 Juni 1974.

masalah karena untuk sebagian harus diimpor. Selain itu penarikan sekitar 30.000 orang pasukan Portugis berarti suatu pukulan berat bagi perekonomian negeri karena mereka merupakan pasaran yang penting. Untuk mereka Pemerintah Portugis setiap bulan mengeluarkan sekitar 92 juta eskudo atau 1.800 juta rupiah yang untuk sebagian besar dibelanjakan dalam negeri. Neraca pembayaran juga akan mengalami kegoncangan dengan penarikan mereka, karena selama ini gaji mereka tidak hanya dapat menutup defisit perdagangan tetapi bahkan juga mengakibatkan suatu surplus pembayaran¹.

Selama perang kemerdekaan terjadi suatu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Banyak orang meninggalkan kampung halaman mereka untuk menghindari pertempuran-pertempuran dan pergi ke tempat-tempat yang lebih aman. Selain itu di daerah-daerah yang dikuasai tentara Portugis penduduk dikumpulkan di desa-desa yang dijadikan benteng dalam rangka pasifikasi yang dirintis Jendral Schultz untuk merebut hati rakyat. Desa-desa itu diperlengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, pertokoan dan sebagainya, sehingga lambat laun menarik orang-orang daerah sekitarnya. Setelah perang berakhir dan daerah menjadi aman kembali, kebanyakan ingin kembali ke kampung halaman mereka dan mengolah tanah mereka. Akan tetapi kebanyakan desa asal mereka telah rusak dan tanahnya menjadi hutan belukar. Untuk memulai hidup baru mereka memerlukan banyak bantuan.

Kepulauan Cabo Verde juga merupakan suatu masalah. Seperti terungkap dalam namanya, Partai Afrika Untuk Kemerdekaan Guinea dan Cabo Verde memperjuangkan penyatuan Guinea Bissau dan kepulauan itu menjadi satu negara, terutama karena banyak pemimpinnya berasal dari kepulauan itu. Akan tetapi Portugal menentangnya karena berpendapat, bahwa hal itu harus diputuskan oleh rakyat Cabo Verde sendiri. Sebagai jalan tengah dicapai sepakat kata bahwa pada waktunya akan diadakan suatu referendum di kepulauan itu untuk menentukan hari depannya.

2. Prospek Guinea Bissau

Dengan demikian pemimpin-pemimpin Guinea Bissau menghadapi suatu tugas yang berat dalam menjalankan roda pemerintahan dan merencanakan pembangunan yang perlu untuk memperbaiki nasib rakyatnya. Akan tetapi rupanya mereka secara berangsur-angsur akan dapat mengatasinya.

¹Cf. "Free at last", Newsweek, 9 September 1974; "10 September 1974: Guinea-Bissau Lahir", Kompas, 14 September 1974; "Image of Guinea-Bissau changing as peace returns", AFP/10, 24 September 1974.

Berkat kebijaksanaan dan perjuangan Amilcar Cabral dan kawan-kawan, PAIGC rupanya telah siap untuk menikul tanggung jawab memimpin negara. Selain mempunyai suatu organisasi politik maupun militer yang baik, partai berhasil mendapatkan dukungan cukup luas di kalangan rakyat, antara lain karena berhasil membangun sel-sel di daerah pedesaan dan melaksanakan suatu program pembangunan di daerah-daerah yang dibebaskannya. Lagi pula partai berhasil membentuk suatu kader baik dalam jumlah yang mencukupi. Dengan bantuan luar negeri partai berhasil mengirinkan banyak orang yang berbakat ke luar negeri untuk belajar menjadi teknikus, dokter, ahli hukum, guru, perawat dan lain sebagainya. Pengalaman yang diperoleh selama perang gerilya juga merupakan suatu modal yang berharga.

PAIGC rupanya juga cukup kuat untuk menghadapi perlawanan partai-partai lain dan pertentangan antar suku, tidak hanya karena mempunyai angkatan bersenjata sekitar 10.000 orang pasukan yang terlatih baik, berdisiplin dan berpengalaman menghadapi musuh, tetapi juga karena dukungan rakyat tersebut. Dengan demikian pemerintah mampu mencegah timbulnya perlawanan bersenjata dan perang antar suku. Perlawanan suku-suku yang loyal terhadap Portugal kiranya berkurang sebagai hasil persetujuan antara Portugal dan PAIGC tersebut. Tugas nation building adalah berat, tetapi secara berangsur-angsur dapat diselesaikan.

Demobilisasi pasukan-pasukan Portugis yang berkebangsaan Afrika kiranya dapat dijalankan dengan baik pula. Sesuai dengan persetujuan tersebut, pemerintah Portugis langsung mulai melucuti pasukan-pasukan itu dengan membeli kembali senjata yang selama ini mereka pakai dengan harga yang menarik. Kelompok para militer, sekitar 8.000 orang, kiranya dapat disalurkan kembali ke tempat asal mereka di mana mereka mungkin dapat menjadi penggerak pembangunan. Serdadu-serdadu profesional, sekitar 7.000 orang, lebih sukar disalurkan ke kehidupan sipil, tetapi setelah dilucuti senjatanya tidak akan dapat berbuat banyak untuk menimbulkan kerusuhan. Lagi pula sebagian kiranya dapat diintegrasikan dalam angkatan bersenjata nasional secara individuil.

Pembangunan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat memang merupakan suatu tugas yang berat. Akan tetapi Guinea Bissau mempunyai modal yang berharga dalam kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama peperangan. Untuk merebut hati rakyat dan mempertahankan kekuasaannya, pemerintah kolonial Portugis selain operasi-operasi militer juga melancarkan suatu kampanye pasifikasi yang mencakup suatu program pembangunan yang cukup luas seperti perluasan prasarana, fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan

pertanian dan lain sebagainya. Sebagai tanggapan PAIGC juga melaksanakan suatu program pembangunan di daerah-daerah yang telah dibebaskan dan selain itu juga membangun suatu sistem administrasi yang teratur, termasuk peradilan. Menurut laporan, Guinea Bissau telah lebih banyak mengalami kemajuan selama peperangan itu dari pada sebelumnya. Setelah peperangan berakhir, pemerintah dan PAIGC dapat lebih mengerahkan tenaga dan dana untuk mengembangkan perekonomian dan prasarananya. Lagi pula dalam usaha pembangunan itu mereka dapat mengharapkan bantuan luar negeri, tidak hanya dari negara-negara dan badan-badan internasional yang selama ini membantu PAIGC, tetapi juga dari Portugal dan PBB yang telah menjanjikan.

Kepulauan Cabo Verde untuk sementara masih diperintah Portugal sebagai salah satu propinsi seberang lautannya, akan tetapi sesuai dengan persetujuan tersebut PAIGC bebas mengadakan propaganda dan mempengaruhi rakyatnya agar memilih persatuan dengan Guinea Bissau. Hasil referendum sukar diramalkan, tetapi PAIGC rupanya mempunyai kemungkinan menang yang besar, antara lain karena banyak anggotanya berasal dari kepulauan itu dan perjuangannya banyak mendapat dukungan. Lagi pula penggabungan kedua negeri itu akan menguntungkan keduanya dan meningkatkan kemampuan negara baru untuk mengatasi masalah-masalahnya. Cabo Verde berpenduduk sekitar 225.000 orang yang umumnya lebih terdidik dari penduduk Guinea Bissau, akan tetapi negeri mereka kurang mampu menjamin suatu kehidupan yang layak. Dapat dikatakan, bahwa kedua negeri itu dapat saling melengkapi. Guinea Bissau memerlukan tambahan penduduk dan tenaga-tenaga terdidik untuk pembangunannya. Cabo Verde dapat memenuhi kebutuhan itu dan sekaligus mengurangi tekanan penduduk yang dialaminya. Selain itu Cabo Verde tidak dapat berdiri sendiri sebagai negara merdeka, sedangkan persatuan dengan Portugal dilihat sebagai bentuk neo-kolonialisme. Lagi pula sebagian penduduk Guinea Bissau berasal dari Cabo Verde dan di kedua negeri itu digunakan bahasa resmi yang sama.

V. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bekas negeri jajahan Portugalia Guinea Bissau telah berhasil mendapatkan kemerdekaan karena berbagai faktor yang menguntungkan. Perjuangan kaum nasionalis PAIGC, termasuk perang gerilya yang makin lama makin efisien, tekanan internasional yang semakin kuat, dan keyakinan Pemerintah baru

Portugal bahwa konflik dengan kaum nasionalis tidak dapat diselesaikan secara militer dan oleh sebab itu harus dicari suatu penyelesaian politik, semuanya itu telah mendorong Portugal untuk melebarkan politik kolonialnya dan memulai suatu proses dekolonisasi. Dengan perkataan lain, kemerdekaan Guinea Bissau itu adalah hasil perjuangan kaum nasionalis dan kekuatan-kekuatan anti kolonial di satu pihak dan hasil politik baru Portugal di lain pihak.

Kemerdekaan Guinea Bissau itu dapat disambut dengan gembira, tidak hanya karena berarti bahwa suatu negeri jajahan mendapatkan haknya atas kemerdekaan, melainkan juga karena konsekwensi-konsekwensinya. Dapat diperkirakan, bahwa kemerdekaan itu akan mempercepat proses dekolonisasi, tidak hanya negeri-negeri jajahan Portugis lainnya melainkan juga negeri-negeri yang dikuasai rejim minoritas kulit putih, khususnya Rhodesia dan Afrika Selatan. Di kedua negeri yang terakhir ini tekanan baik intern maupun ekstern akan semakin meningkat sampai rejim yang berkuasa itu merubah politiknya dan mengakui hak-hak demokrasi rakyat Afrika yang merupakan mayoritas.

Oleh sebab itu kemerdekaan Guinea Bissau sebagai implementasi politik dekolonisasi Portugal menimbulkan keprihatinan dan kecewasan di Rhodesia dan Afrika Selatan. Sebagai tanggapan, rejim minoritas kulit putih dapat meningkatkan kemampuan militernya untuk mempertahankan dominasinya atas mayoritas rakyat dan kedudukan istimewanya, akan tetapi dapat diragukan kemampuannya untuk membendung proses dekolonisasi selama-lamanya. Menurut perhitungan, Rhodesia tidak akan dapat bertahan lama dan mencegah pembentukan pemerintahan mayoritas negro. Setelah Rhodesia jatuh, Afrika Selatan akan sukar bertahan melawan perang gerilya yang dengan bantuan negara-negara Afrika dan OAU akan ditingkatkan secara drastis dan perlawanan rakyat negro. Akhirnya rejim minoritas kulit putih akan terpaksa melepaskan politik apartheidnya dan membentuk majority rule atau bertempur sampai hancur.

Dengan pengakuan kemerdekaan itu perjuangan PAIGC dan rakyat Guinea Bissau belum berakhir. Kemerdekaan bukanlah tujuan terakhir, melainkan suatu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, yaitu kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat.

Sehubungan dengan itu Guinea Bissau harus menyelesaikan sejumlah masalah yang dihadapinya. Yang penting ialah penyaluran sekitar 15.000 orang Guinea Bissau yang sebelumnya berdinass dalam angkatan perang Portugis, partai-partai politik lain yang berusaha

untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan dalam pemerintah baru, persaingan dan pertentangan antar suku, masalah pengungsi, kesukaran-kesukaran ekonomi dan persoalan Cabo Verde. Dengan demikian Guinea Bissau menghadapi suatu tugas yang berat.

Namun negara baru itu mempunyai suatu peluang yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dan menjalankan tugas pembangunannya. PAIGC rupanya telah siap untuk tugas itu. Selain memiliki suatu organisasi politik maupun militer yang baik, partai itu juga berhasil membentuk sel-sel sampai tingkat desa, mendapatkan dukungan rakyat yang cukup luas, membentuk suatu kader yang baik, dalam jumlah yang mencukupi untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Derajat semuanya itu partai mampu untuk membentuk suatu pemerintah yang stabil dan kompeten, dan menjaga ketertiban dan keamanan. Selain itu kemajuan yang dicapai selama peperangan sebagai hasil program pembangunan PAIGC maupun orang-orang Portugis merupakan suatu modal pembangunan yang berharga. Sementara itu Guinea Bissau dapat mengharapkan bantuan baik dari negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang selama ini membantu PAIGC maupun dari pemerintah Portugis dan PBB yang telah menjanjikannya.

Kemungkinan besar Guinea Bissau juga akan dapat menyelesaikan persoalan Cabo Verde dengan baik. Paling tidak PAIGC mempunyai suatu peluang yang baik untuk memenangkan referendum yang direncanakan di negeri itu. Penggabungan kedua negeri itu menjadi satu negara akan menguntungkan keduanya dan meningkatkan kemampuan Guinea Bissau untuk mengatasi masalah-masalahnya dan menjalankan tugasnya, terutama karena mereka saling melengkapi.